

THE EARTHQUAKE AND TSUNAMI EMERGENCY SUPPORT PROJECT (ETESP)

Fact Sheet

Point-poin penting:

- Total hibah: \$294,5 juta
- 12 komponen: pertanian, perikanan, usaha mikro dan kecil, kesehatan, pendidikan, penyediaan air dan sanitasi wilayah pedesaan, perumahan, irigasi, perencanaan spasial dan pengelolaan lingkungan, jalan dan jembatan, ketenagalistrikan, tata kelola pelaksanaan.
- Perkembangan sampai Maret 2009: kontrak mencapai \$288,3 juta, penyerapan \$244,6 juta.

Proyek Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP) yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2005. ETESP didanai oleh dana hibah Asian Tsunami Fund sebesar \$ 291 juta dan dana hibah dari Pemerintah Belanda sebesar \$ 3,5 juta. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) merupakan Badan Pelaksana ETESP sampai berakhirnya masa tugas lembaga tersebut di bulan April 2009. Setelahnya, peran BRR diganti oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Rancangan Proyek

Secara keseluruhan sasaran ETESP adalah untuk membantu membangun kembali wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana dan mendukung pemulihan perekonomian wilayah tersebut. ETESP bertujuan untuk (i) memfasilitasi pemulihan ekonomi di wilayah yang terkena dampak bencana dengan pemulihan mata pencaharian; dan (ii) meringankan permasalahan yang menyebabkan keterbatasan barang-barang kebutuhan dan fasilitas masyarakat dengan memulihkan pelayanan publik yang penting dan membangun kembali infrastruktur. Untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang kritis secara fleksibel, ETESP dirancang sebagai sebuah fasilitas proyek multisektor dengan 12 komponen di bawah lima kelompok sektor utama:

- Pemulihan mata pencaharian masyarakat. Rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Aceh dan Nias, dan pemulihan usaha kecil dan mikro.
- Penyediaan pelayanan sosial. Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Infrastruktur masyarakat. Penyediaan fasilitas air dan sanitasi, pembangunan kembali infrastruktur irigasi, dan merehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang rusak dan hilang dengan kerangka pembangunan masyarakat terpadu.
- Infrastruktur fisik. Pembangunan kembali jalan dan jembatan yang rusak, pemulihan persediaan listrik, mendukung perencanaan tata ruang dan memperkuat sistem manajemen lingkungan.
- Pengawasan tata kelola pelaksanaan. Mengawasi terjadinya kesalahan penggunaan dana bantuan dalam proses rehabilitasi

dan rekonstruksi secara keseluruhan dan memfasilitasi penyampaian bantuan ETESP yang efektif.

Pendekatan sektoral yang digunakan untuk ETESP memfasilitasi perancangan sub-proyek berdasarkan studi kelayakan dan konsultasi masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa ADB dapat dengan efektif mengkoordinasikan komponen-komponen ETESP dengan bantuan yang disediakan oleh donor lainnya. Setelah melakukan konsultasi dengan BRR serta mitra-mitra pembangunan lainnya, dan dengan mengambil pelajaran dari pelaksanaan proyek, masukan dari lapangan dan pertimbangan perkembangan ekonomi termasuk inflasi, rancangan ETESP beberapa kali mengalami penyesuaian termasuk untuk alokasi proyek, cakupan dan fokus geografis.

Tabel 1 menunjukkan alokasi terkini dana hibah untuk 12 komponen ETESP, sementara Tabel 2 memberikan informasi ringkas tentang komponen-komponen tersebut.

Perkembangan sampai saat ini

ETESP telah mengalami perkembangan yang berarti setelah hampir 4 tahun masa pelaksanaan. Total nilai kontrak kumulatif sampai akhir bulan Maret 2009 mencapai \$288,3 juta sementara penyerapan kumulatif telah mencapai \$244,6 juta.

Empat (4) komponen telah rampung pelaksanaannya di akhir 2009 yaitu pertanian, irigasi, ketenagalistrikan dan kesehatan sementara komponen usaha kecil dan mikro selesai di bulan April 2009. Komponen-komponen lainnya, yaitu perikanan, perumahan, perencanaan spasial dan pengelolaan lingkungan, penyediaan air dan sanitasi wilayah pedesaan, jalan dan jembatan dan tata kelola pelaksanaan direncanakan selesai sebelum bulan September 2009.

Perlindungan Sosial dan Lingkungan

Pemerintah Republik Indonesia dan ADB telah berkomitmen untuk melaksanakan dan mengelola dana ETESP dengan efektif, dan telah menerapkan kaidah-kaidah perlindungan sosial dan lingkungan. Prosedur dan pedoman penilaian dampak sosial dan lingkungan yang memenuhi ketentuan ADB telah dikembangkan pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2006, Pemerintah Propinsi NAD dan Sumatera Utara telah menyetujui untuk

Tabel 1. Alokasi, Kontrak dan Penggunaan Hibah ETESP

Komponen	Alokasi (\$ juta)	Kontrak (\$ juta)	Penggunaan (\$ juta)	Kontrak (%)	Penggunaan (%)
Pertanian	34.0	32.7	31.6	96.3%	93.1%
Perikanan	28.0	26.8	24.8	95.8%	88.7%
Usaha Mikro dan Kecil	15.0	14.3	10.3	95.1%	68.9%
Kesehatan	12.0	11.9	11.3	99.4%	94.3%
Pendidikan	17.0	15.4	14.3	90.8%	83.9%
Penyediaan Air dan Sanitasi Wilayah Pedesaan	7.0	6.3	5.5	89.8%	77.9%
Perumahan	71.5	72.4	57.3	101.2%	80.1%
Irigasi	30.0	30.0	29.2	99.9%	97.4%
Perencanaan Spasial dan Pengelolaan Lingkungan	17.0	17.1	12.7	100.6%	74.7%
Jalan dan Jembatan	38.0	36.2	25.8	95.4%	67.9%
Ketenagalistrikan	9.5	9.7	9.1	102.0%	96.1%
Tata Kelola Pelaksanaan (ADB)	15.5	15.4	12.6	99.5%	81.6%
Total	294.5	288.3	244.6	97.9%	83.1%

menyesuaikan prosedur penilaian lingkungan antara ADB dan pemerintah.

Laporan awal pemeriksaan lingkungan mengindikasikan bahwa tidak ada sub-proyek ETESP yang berdampak negatif terhadap lingkungan walaupun pengendalian resiko tetap diterapkan di beberapa sub-proyek. Sekitar 38% dari sub-proyek membutuhkan pembebasan tanah. Rencana aksi masyarakat yang sejalan dengan rencana aksi pembebasan tanah dan pemukiman kembali telah dipersiapkan, ditinjau dan dilaksanakan untuk sub-proyek yang membutuhkan pembebasan tanah ini.

Koordinasi dengan Mitra Pembangunan dan Program Mitra Pembangunan

ADB berkoordinasi dengan erat dengan mitra-mitra pembangunan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (NGO) untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan saling melengkapi. Sebagai contoh, pada masa darurat, Mercy Corp telah dipercayakan untuk menyalurkan hibah pemulihan sumber mata pencaharian. Sebagian kegiatan di komponen perumahan dilaksanakan melalui kerjasama dengan UN-Habitat dan empat

NGO, seperti Cordaid, German Argo Action, HelpeV dan Muslim Aid.

Pelaksanaan komponen penyediaan air dan sanitasi wilayah pedesaan dikoordinasikan dengan proyek serupa yang didanai oleh Pemerintah Kanada, Belanda dan Inggris.

Kegiatan ETESP untuk perencanaan tata ruang desa dan kecamatan telah menjadi pedoman untuk kegiatan pembangunan setempat yang didukung oleh lembaga donor dan NGO lainnya. Di bawah ETESP, perencanaan infrastruktur dijalankan di sepanjang pesisir Ttmur Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan program Infrastructure Reconstruction Financing Facility dari Multi Donor Trust Fund.

Dalam bidang keuangan mikro, kerjasama strategis telah dibentuk dengan program keuangan mikro yang dilaksanakan oleh BRR, German Technical Cooperation (GTZ), International Labor Organization (ILO), United Nations Development Programme (UNDP), German Savings Bank Foundation dan Bank Indonesia.

Tabel 2: Ringkasan Bidang dan Cakupan Geografis Tiap Komponen

INFORMASI KEUANGAN DAN GEOGRAFIS	BIDANG
Pemulihan Mata Pencaharian	
<p>Komponen: Pertanian Besar Dana Hibah: \$34 juta Cakupan Geografis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue. 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pemulihan pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • pelatihan kelompok self-help mengenai produksi tanaman perkebunan, hasil panen, unggas dan hewan ternak kecil dan tanaman hortikultura; • rehabilitasi sekitar 20.000 ha lahan pertanian (termasuk perbaikan tanah dan penghilangan kadar garam di 6000 ha lahan pertanian dan peningkatan lahan pertanian yang rusak parah sekitar 5000 ha; dan • mendukung pembukaan lahan untuk produksi seluas 15.000 ha dan untuk perbaikan sekitar 15.000 ha tanaman perkebunan. ➔ Pemulihan pelayanan pendukung pertanian: <ul style="list-style-type: none"> • memperkenalkan metodologi yang lebih luas, seperti sekolah petani yang partisipatif dan riset yang berasal dari inisiatif petani; • merekrut lulusan ahli pertanian yang mungkin nantinya akan dipekerjakan oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten dan propinsi sebagai kader tetap; • pelatihan staf tentang metodologi partisipatif, perencanaan tata guna lahan, produksi perkebunan, dan pengukuran usaha perbaikan untuk salinisasi dan permasalahan yang berkaitan dengan tsunami lainnya; dan • rehabilitasi fasilitas pertanian kunci, dan persediaan kendaraan dan perlengkapan yang penting. ➔ Pemberdayaan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • fasilitas masyarakat dan pengembangan kemampuan untuk kelompok self-help dengan bantuan dari Bina Swadaya, sebuah LSM nasional.
<p>Komponen: Perikanan Besar Dana Hibah : \$28 juta Cakupan Geografis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Kabupaten Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Utara, Pidie, Aceh Jaya, Simeulue. Kota Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe. • Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pemberdayaan masyarakat: bekerjasama dengan Bina Swadaya, sebuah LSM nasional, organisasi pendukung, pelatihan, dan pemberdayaan nelayan dan kelompok nelayan dan bantuan kepada 325 desa pesisir. ➔ Mencakup perikanan: pembuatan dan perbaikan kapal penangkap ikan, mesin dan peralatan untuk memancing. ➔ Budidaya peraian: membantu nelayan udang dan ikan skala kecil untuk merehabilitasi kolam dan infrastruktur yang rusak, fasilitas dan tempat penetasan budidaya kelautan, memulai kembali usaha budidaya peraian yang produktif. ➔ Infrastruktur perikanan dan fasilitas paska panen: rehabilitasi tempat pendaratan ikan masyarakat dan Kabupaten, pasar dan infrastruktur perikanan penting lainnya. ➔ Rehabilitasi sumber daya pesisir: merehabilitasi sumber daya alam pesisir, termasuk bakau dan habitat hutan pesisir lainnya, berekangan dengan perikanan dan budidaya perairan. ➔ Pemulihan pelayanan perikanan: pemulihan pelayanan dan kapasitas perluasan perikanan yang rusak.

INFORMASI KEUANGAN DAN GEOGRAFIS	BIDANG
Komponen: Usaha Kecil dan Mikro Besar Dana Hibah: \$15 juta Cakupan Geografis: <ul style="list-style-type: none"> • Aceh dan Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Mendukung sistem keuangan mikro komersil melalui penyediaan fasilitas untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk meminjamkan kepada usaha kecil dan mikro. ➔ Memperkuat BPR dan LKM dengan memperkenalkan pendekatan keuangan mikro yang sudah teruji, memperbaiki system IT, pengembangan produk/inovasi, dll. ➔ Menyediakan respon darurat untuk rehabilitasi atau memulihkan usaha mikro dan SME yang rusak karena bencana.
Penyediaan Pelayanan Masyarakat	
Komponen: Kesehatan Besar Dana Hibah \$12 juta Cakupan geografis: <ul style="list-style-type: none"> • Aceh dan Nias Pulau 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Memperkuat manajemen sumber daya manusia dalam bidang kesehatan, khususnya untuk perawat, bidan dan ahli kesehatan mental. ➔ Merehabilitasi pusat kesehatan yang sudah ada dan membangun pusat kesehatan baru, dan fasilitas pengelolaan limbah. medis. ➔ Pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki pengelolaan limbah medis.
Komponen: Pendidikan Besar Dana Hibah: \$17 juta Cakupan Geografis: <ul style="list-style-type: none"> • Aceh dan Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Membangun dan melengkapi fasilitas khusus -- laboratorium ilmu pengetahuan umum dan komputer. ➔ Pelatihan personil pendidikan tentang pengoperasian laboratorium dan penggunaan peralatan. ➔ Penyediaan materi belajar-mengajar kepada siswa sekolah menengah atas; dan ➔ Pembangunan model Sekolah Menengah Atas Sabang di Pulau Sabang.
Infrastruktur Masyarakat	
Komponen: Infrastruktur dan Persediaan Air Desa Besar Dana Hibah: \$7 juta ^a Cakupan Geografis: <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Jaya, Nagan Raya, • Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Mengembangkan dan memperluas jangkauan fasilitas persediaan air dan sanitasi. ➔ Rehabilitasi fasilitas persediaan air dan sanitasi masyarakat. ➔ Pemberdayaan masyarakat tentang air dan sanitasi, dan staf ilmu kesehatan pada tingkat pemerintahan setempat. ➔ Pendirian kembali pemerintahan setempat dan kapasitas masyarakat untuk memastikan perencanaan partisipatif untuk fasilitas yang dibangun. ➔ Mempromosikan perubahan perilaku higienis dan sanitasi.
Komponen: Irigasi Besar Dana Hibah: \$30 juta ^b Cakupan Geografis: <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Aceh Besar, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Jaya • Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Rehabilitasi lebih dari 93 sistem irigasi yang meliputi lebih dari 59.000 ha, termasuk 55.000 ha di Aceh dan 4.000 ha di Pulau Nias. ➔ Menguatkan kelembagaan asosiasi institusi pengguna air untuk mengelola dan mengkoordinasi pada tingkat kabupaten.
Komponen: Perumahan Besar Dana Hibah: \$71,5 juta Cakupan Geografis:	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Pembangunan sekitar 6.500 rumah baru dan rehabilitasi 2.500 rumah yang rusak. ➔ Penyediaan infrastruktur penting tingkat desa.

^a Termasuk dana sebesar \$ 16,5 juta yang disetujui di bawah hibah Grant No. 03-INO Kesehatan dan Penyediaan Air Masyarakat Aceh-Nias/Sumatera Utara. Proyek ini didanai oleh Pemerintah Kanada, Pemerintah Belanda dan Pemerintah Inggris berkaitan dengan pinjaman ADB sebesar \$ 65 juta.

^b Termasuk dana hibah sebesar \$1 juta untuk Nias dari Pemerintah Luxemburg, sebagai dana tambahan untuk ETESP komponen ini.

INFORMASI KEUANGAN DAN GEOGRAFIS	BIDANG
<ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Nias, Simeulue, Sabang, Pidie, Lhokseumawe • Pulau Nias 	
Infrastruktur Fisik	
<p>Komponen: Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Besar Dana Hibah: \$17 juta Cakupan Geografis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Sabang, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireun, Nagan Raya, Simeulue • Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Perencanaan tata ruang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, dan pengidentifikasian proyek-proyek infrastruktur dan mata pencaharian. ➔ Penilaian ekologi dan lingkungan, dan rancangan perlindungan lingkungan. ➔ Pemetaan dan Sistem Informasi Geografi (GIS) dan rancangan perlindungan lingkungan. ➔ Mendukung komponen ETESP lainnya dan pihak ketiga dalam pemetaan dan GIS.
<p>Komponen: Jalan dan jembatan Besar Dana Hibah: \$38 juta Cakupan geografis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Rehabilitasi dan perbaikan bagian jalan yang kritis di pesisir utara dan timur, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Jalan Krueng Raya, yang menghubungkan Pelabuhan Malahayati dengan kota Banda Aceh. • Jalan Ulee Lheue di Banda Aceh yang melayani wilayah pemukiman dan bisnis Meuraksa dan menyediakan akses dari Kota Banda Aceh dan Jalan Pesisir Barat ke Pelabuhan Ferry dan Pelabuhan Nelayan Ulee Lheue. • Jalan Pesisir Timur dari Banda Aceh ke Lhokseumawe yang membentuk rute utama untuk transportasi barang-barang masuk ke Aceh melalui Pelabuhan Belawan.
<p>Komponen: Ketenagalistrikan Besar Dana Hibah: \$9,5 juta Cakupan geografis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceh: Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat, Simeulue 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Rehabilitasi jaringan distribusi voltase rendah. ➔ Membangun pusat pelayanan PLN di Banda Aceh. ➔ Memasang sistem SCADA untuk wilayah pelayanan Banda Aceh
Pengawasan Keuangan	
<p>Besar Dana Hibah: \$15,5 juta^c Cakupan geografis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceh dan Pulau Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Membantu BRR untuk mendirikan sistem pengawasan internal ➔ Membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kantornya di Banda Aceh. ➔ Membantu Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh dalam mendirikan system penyaluran dana dan pengawasan internal. ➔ Memulihkan kapasitas Struktur Audit Internal Pemerintah Daerah. ➔ Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan kantor wilayahnya di Banda Aceh.

^c Termasuk dana sejumlah \$3,5 juta yang dibiayai oleh Pemerintah Belandan untuk Pengawasan Keuangan.